

TAJUK RENCANA

Bersiap Ikuti Pemilu

PEMILIHAN Umum (Pemilu) tahun 2024 sudah kian dekat. Berbagai tahapan untuk menuju waktu pesta demokrasi tersebut sudah dilakukan sejak beberapa waktu lalu. Terkini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menetapkan partai-partai yang berhak mengikuti pemungutan suara, bahkan sudah dilakukan pengundian nomor urut.

Sebagaimana diberitakan *KR* kemarin, sebanyak sebanyak tujuh belas (17) partai politik (parpol) serta 6 partai lokal Aceh dinyatakan memenuhi syarat untuk lolos tahapan verifikasi faktual, sehingga berhak menjadi peserta Pemilu 2024. Sedang satu partai tak lolos, karena tidak memenuhi syarat, yaitu Partai Ummat yang tidak memenuhi syarat untuk dinyatakan lolos verifikasi faktual di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Utara (Sulut).

Penetapan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan Parpol Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR Aceh dan Kabupaten/Kota Tahun 2024.

Bagi partai yang lolos bisa menjadi peserta Pemilu, tentu saja harus segera melakukan berbagai persiapan, khususnya menyiapkan calon anggota legislatif di semua tingkatan. Untuk ini pasti memerlukan pemikiran panjang, khususnya dalam menjaring kader-kader terbaik yang diharapkan bisa untuk meraih kemenangan, di samping selama ini kader-kader partai yang akan maju sudah melakukan berbagai persiapan, antara lain dengan banyak turun ke masyarakat atau tampil dalam berbagai kesempatan. Harapannya, meski dalam satu partaipun akan terjadi persaingan, namun yang terjadi nanti adalah persaingan yang sehat, menggunakan cara-cara santun dan elegan, bukan cara-cara kotor dan tidak terhormat.

Sedang bagi partai yang tidak lolos, kalau mau mempersalahkan keputusan KPU tersebut tentu harus mempunyai data-data dan fakta-fakta yang kuat, bahwa partai tersebut memang layak lolos verifikasi. Meski pihak KPU, dalam melakukan verifikasi pasti mempunyai kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan UU yang berlaku, sehingga kalau ada gugatan, misalnya, pasti sudah mempunyai fakta-fakta dan data-data untuk menghadapi. Soal nanti siapa yang menang atau kalah, akan dibuktikan melalui pengujian data dan fakta masing-masing.

Bagi masyarakat luas non politisi, umumnya berharap semua tahapan persiapan Pemilu berjalan lancar, begitu juga saat puncaknya nanti dan bisa menghasilkan pemimpin atau anggota legislatif yang kredibel sehingga bisa membawa kemajuan bagi bangsa dan negara. Kalaupun nantinya terjadi ketidakpuasan atau sengketa pascapemilu, hendaknya diselesaikan melalui jalur yang sudah disediakan. Karena sebagaimana tahun-tahun sebelumnya usai penetapan penghitungan suara terjadi sengketa.

Semoga, semua komisioner KPU dan jajarannya di semua tingkatan bisa menjalankan amanahnya dengan baik sesuai undang-undang dan peraturan terkait sehingga nantinya bisa *husnul khotimah* dalam mengemban tugas. Adanya komisioner KPU yang terkena kasus hukum, bahkan sampai masuk hotel prodeo, jangan sampai terjadi lagi di masa-masa mendatang.

Akhirnya, kita berharap pesta demokrasi 2024 nanti betul-betul menjadi pesta yang mengembirakan. Kalaupun ada gesekan-gesekan, tidak sampai menimbulkan masalah berkepanjangan. Setelah Pemilu, semua tetap hidup rukun dan damai untuk terus bersama-sama membangun negeri ini sesuai kapasitas dan bidang masing-masing. □-d

Menabur Benih Kedaulatan Pangan

MENUTUP tahun 2022, dunia terancam krisis pangan global diiringi pandemi Covid-19 dan dampak perang Rusia versus Ukraina. Pandemi dan perang memicu kelangkaan bahan pangan karena terhambatnya distribusi antar-negara. Kita perlu menabur benih kedaulatan pangan.

Presiden Jokowi mengambil langkah antisipatif untuk mencegah meluasnya krisis pangan. Menjaga produktivitas pertanian pangan. Membuka diversifikasi untuk penyediaan bahan pangan alternatif juga dilakukan. Presiden meninjau panen sorgum sebagai komoditas pengganti jagung, pabrik pengolahan, dan produk pangan lain dari sorgum di Waingapu, NTT (2/6/22).

Pemerintah juga telah mengambil langkah khusus untuk mengantisipasi krisis pangan. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian APBN Tahun 2022 amanatkan serta mewajibkan setiap desa memanfaatkan 20% Dana Desa untuk program Ketahanan Pangan Nabati[†]dan Hewani. Lalu diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 128/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa. Selain itu, terbit Permen Desa PDT dan Transmigrasi No 82/2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan Desa, sebagai panduan pembangunan ketahanan pangan di desa. Penyaluran dana desa sudah Rp.51,72 Trilyun atau 76,07% dari pagu Rp.68 triliun (15/9/22).

Langkah strategis

Setelah berbagai kebijakan, regulasi dan penganggaran tersedia, kini perlu kerja lintaskementerian/lembaga dan pemerintah daerah di provinsi dan kabupaten/kota hingga desa bersama masyarakat. Monitoring dan evaluasi rutin Presiden akan mengefektifkan langkah ini. Ada empat langkah strategis agar keamanan dan kedaulatan pangan terwujud.

Pertama, sosialisasi kebijakan pemerintah kepada pemerintah daerah agar aparat daerah memahami langkah yang harus dilakukan untuk mempercepat ketahanan dan kedaulatan pangan.

Usep Setiawan

Identifikasi potensi pengembangan bahan pangan menjadi agenda utama pemerintah daerah. Kedua, sinergi program, kegiatan dan anggaran lintaskementerian/lembaga pemerintah untuk pembangunan pangan. Sinergi ini akan menjadikan urusan pangan sebagai agenda strategis yang beban dan tanggung jawabnya dipikul bersama.



KR-JOKO SANTOSO

Ketiga, kolaborasi dengan organisasi gerakan petani yang mempunyai basis nyata dan lembaga pendamping untuk pertanian pangan. Kolaborasi ini memperkuat partisipasi petani dan memudahkan menjangkau petani secara lebih massif. Keempat, menjadikan pembangunan pangan sebagai gerakan bersama. Pembangunan ketahanan dan kedaulatan pangan didorong menjadi aksi kongkrit rakyat, dengan arah dan panduan teknis pemerintah. Urusan pangan itu milik pemerintah dan rakyat yang melintasi sektoralisme dan limitasi pemerintahan.

Peran petani

Harus diakui, peran petani pertanian pangan tak bisa tergantikan. Petani berperan sentral yang menentukan keberhasilan pembangunan pangan, baik se-

bagai tenaga kerja utama maupun sebagai manajer dalam proses produksi hingga panen tiba. Petani sebagai subjek utama pembangunan pertanian pangan harus diberi tempat lebih luas dalam kebijakan pangan. Keterlibatan petani dalam perencanaan produksi perlu diakomodir pemerintah melalui koperasi atau badan usaha milik petani. UU No.19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani disinergikan dengan kebijakan pertanian dan pemberdayaan petani.

Kelembagaan usaha ekonomi petani berupa koperasi atau badan usaha ekonomi petani perlu diperluas dan dikuatkan. Kelembagaan ini, melakukan penataan produksi pertanian yang menghasilkan berbagai produk pangan yang dilakukan secara bersama.

Kemampuan petani dalam pengolahan hasil produksinya menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, perlu dikembangkan. Kesempatan mendiversifikasi bahan pangan dilakukan seiring kemajuan teknologi. Keanekaragaman hayati milik bangsa perlu diikuti penganekaragaman bahan pangan yang sumbernya melimpah di perdesaan.

Peningkatan kemampuan memasarkan produk pertanian melalui media berbasis teknologi informasi serba digital akan menjadikan pemasaran produk pertanian lebih massif dan menjangkau ruang lebih luas. Pendapatan dan kesejahteraan petani pun meningkat. □-d

*) *Usep Setiawan, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Republik Indonesia.*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opini-kr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Langkah Preventif Cegah Terorisme

DI TENGAH suasana duka akibat Gempa Cianjur, Gempa Garut, semburan awan panas Gunung Semeru di Lumajang maupun sejumlah banjir dan tanah longsor, tiba-tiba menyeruak ledakan bom bunuh diri di Bandung, Rabu (7/12). Bom menyasar Kantor Polsek Astanaanyar. Satu orang anggota polisi Polsek Astanaanyar meninggal dunia akibat bom tersebut. Publik pun bertanya-tanya, mengapa masih ada seseorang yang mengorbankan diri menjadi peledak bom? Apalagi, pelaku masih kategori usia muda.

Menurut Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, pelaku merupakan orang lama. Pernah dipenjara dalam kasus bom Cisendo (KR, 8/12). Namun, hukuman selama 4 tahun tak membuat pelaku jera. Terbukti setelah ke luar penjara 2021, justru melakukan pengeboman dan turut tewas dalam peristiwa tersebut.

Mencegah

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sudah tak kurang-kurang melakukan upaya untuk menekan dan mencegah tindak pidana terorisme. Bahkan, lembaga ini banyak mengembangkan langkah preventif mencegah terorisme. Selain itu, BNPT juga memberi ruang yang luas bagi para eks narapidana terorisme (eks napiter) untuk kembali ke tengah masyarakat. Misalnya, melalui program Kawasan Terpadu Nusantara (KTN). Melalui cara ini eks napiter atau mitra deradikalisasi dan masyarakat daerah sekitar bisa hidup bersama.

Tiga pilar utama yang menopang berdirinya KTN meliputi edukasi, ekonomi dan pariwisata. KTN sudah menanamkan hasil berupa kemenangan hasil pertanian seperti sayuran dan jagung seluas 4 hektare di Kecamatan Turen Kabupaten Malang, Juli lalu (bnpt.go.id). KTN lain yang sedang dikembangkan yakni di

Mohammad Sobirin

Kecamatan Bansari Temanggung.

Selain program KTN, BNPT juga mengembangkan Warung NKRI atau Wadah Akur Rukun Usaha Nurani Gelorakan NKRI, yakni tempat berjualan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk mitra deradikalisasi dan penyintas terorisme. Warung NKRI, merupakan program deradikalisasi melalui pendekatan lunak dengan pemberdayaan ekonomi.

BNPT menyadari kalangan muda rawan menjadi sasaran kelompok teroris yang menyebarkan paham radikalisme, lebih-lebih melalui media sosial. Berdasarkan survei BNPT, diperkirakan 80% generasi milenial rentan terpapar radikalisme. Mereka, cenderung tidak berpikir kritis. Dalam banyak kasus, generasi milenial lebih cenderung menelan mentah-mentah infomasi tanpa terlebih dulu melakukan cek dan ricek.

Kepanjangan Tangan

Dalam beberapa tahun terakhir BNPT memiliki kepanjangan tangan yang disebut Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) yang tersebar di 34 provinsi. Melalui FKPT, program sinergisitas pencegahan terorisme yang dilakukan BNPT semakin membumi dan tepat sasaran. Beberapa kegiatan yang sudah dilakukan misalnya, duta damai dunia maya yang melibatkan kaum muda milenial. Selain itu, ada aksi musik anak bangsa (Asik Bang) berupa festival musik yang arahnya kampanye untuk menjauhkan anak muda dari paham radikalisme dan terorisme. Juga digelar acara Ekspresi Indonesia Muda yang

melibatkan pemuda dengan pitutur kebangsaan.

Tak hanya itu, BNPT dan FKPT juga menyasar para guru dengan pendekatan lunak. Melatih mereka melalui kegiatan *training of trainer* sebagai pelopor moderasi beragama di sekolah. Di tiap provinsi sedikitnya 100 guru mengikuti kegiatan itu. Para guru diberi pembekalan mengenai perkembangan terorisme serta kebijakan pencegahannya berbasis agama dan kerarifan lokal. Selain itu, diberikan pembekalan pembuatan bahan ajar berupa video pendek sosiodrama moderasi beragama. Dari kegiatan ini, guru diharapkan mampu membuat video pendek mengenai moderasi beragama untuk disampaikan kepada anak didiknya di sekolah. □-d

*) *Mohammad Sobirin, Wartawan Kedaulatan Rakyat dan Bidang Media Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi DIY.*

Pojok KR

Pengadaan barang dan jasa paling rawan korupsi.

-- **Institusi pengawasan harus jeli.**

UGM terus sempurnakan fasilitas mahasiswa difabel.

-- **Mereka harus nyaman seperti yang lain.**

Bebas sampah anorganik jadi gerakan bersama.

-- **Kalau bukan gerakan bersama pasti gagal.**

Beraksi

PIKIRAN PEMBACA
Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA
pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Tanah Kosong Jadi Pembuangan Sampah

MELEWATI Jl Kaliurang Utara Ringroad, akan dilihat beberapa tanah kosong. Ironisnya, tanah-tanah tersebut tidak diurus dan terbiarkan rumputnya meninggi. Tentu saja memunculkan kesan tidak menarik, kotor.

Kian memprihatinkan, di tanah-tanah yang tidak dipagar tersebut kemudian dimanfaatkan orang sebagai tempat pembuangan sampah. Hal ini tampak dari adanya beberapa tas kresek hitam yang diikat yang dibuang di kawasan tersebut. Bukan hanya tanah yang luas, namun tanah antara kios yang ditutup dengan sebuah rumah di Jl Kaliurang KM 13,5 juga berserak tas-tas berwarna hitam yang diikat.

Mungkin sekarang hanya 2 - 5 tak kresek hitam yang dibuang disitu. Namun karena bukan 'pos' sampah, tentu sampah tersebut tidak akan diambil petugas kebersihan. Dan jika satu dua dibiarkan dibuang disitu, nanti lama kelamaan akan menjadi bukit. Dalam arti, orang akan seandainya membuang sampah di tempat yang tidak semestinya.

Mungkin Pemkab Sleman lewat dinas kebersihan perlu memperhatikan hal tersebut. Jangan sampai terbiarkan sampah membukit di tempat yang tidak seharusnya. Bukan hanya tanpa karu namun juga bisa menebarkan bakteri penyakit. □-d

Edi, Harjobinangun Pakem

Kedaulatan Rakyat

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gunung Surohoro Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjianti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSoS. **Alamat Percetakan:** Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggung-jawab percetakan **Alamat Homepage:** <http://www.kr.co.id> dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahr@gmail.com. **Radio** : KR Radio 107.2 FM. **Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta. **Perwakilan dan Biro:** **Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja. **Wartawan** : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. **Semarang** : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP. **Banyumas** : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPD, Wakil : Driyanto. **Klaten** : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti. **Kulonprogo** : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPD, Wakil : Asrul Sani. **Gunungkidul** : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP